

KORAN DIGITAL

radar.
MEDIA

RADAR SAMARINDA

EDISI JUMAT
10 NOV 2023

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM



SRIKANDI GAJAR GANDENG PMI SAMARINDA GELAR DONOR DARAH, WUJUD PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**SAFUAD DORONG PEMERINTAH
SIAPKAN LANGKAH KONKRET
HADAPI EL NINO**



Sukarelawan Srikandi Ganjar saat menggelar donor darah di PMI Kota Samarinda, Kamis (9/11).

SRIKANDI GAJAR GANDENG PMI SAMARINDA GELAR DONOR DARAH, WUJUD PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SAMARINDA - Sukarelawan Srikandi Ganjar tak henti-hentinya menjalankan misi kemanusiaan melalui program yang bermanfaat untuk masyarakat di beberapa daerah Indonesia.

Kali ini, loyalis Ganjar Pranowo tersebut berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Samarinda untuk menggelar donor darah di Jalan Palang Merah Nomor 1, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), pada Kamis (9/11/2023).

Koordinator Wilayah (Korwil) Srikandi Ganjar Kaltim, Rhyta Salsabila menyatakan, pihaknya menggerakkan anak muda dan masyarakat di wilayah itu untuk turut mendonorkan darah.

"Kami mengadakan kegiatan donor darah Srikandi berkolaborasi dengan PMI di Kota Samarinda. Kami sekaligus menjalin silaturahmi dengan rekan-rekan di sini," ujarnya.

Kegiatan donor darah ini dilakukan loyalis

Ganjar Pranowo sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

"Manfaatnya untuk kesehatan jantung. Relawan mendonorkan darah kepada orang yang lebih membutuhkan dan juga menyelamatkan tubuh," jelasnya.

Rhyta juga mengajak kaum milenial dan masyarakat umum untuk turut bergabung bersama PMI dalam gerakan ini.

"Ayo donor darah agar tubuh kita tetap sehat dan bermanfaat untuk orang lain. Kami dari pemuda, masyarakat umum, dan anggota PMI," tambahnya.

Srikandi Ganjar juga menyosialisasikan pasangan calon capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD kepada warga di wilayah setempat.

"Harapannya, rekan yang hadir mendukung Ganjar Pranowo menjadi presiden 2024," tutupnya.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Safuad

SAFUAD DORONG PEMERINTAH SIAPKAN LANGKAH KONKRET HADAPI EL NINO

SAMARINDA - Dampak El Nino yang mengancam dunia termasuk di Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat perhatian dari Anggota DPRD Kaltim, Safuad. Menurutnya El Nino, bisa berdampak pada beberapa sektor khususnya pertanian.

Berdasar prediksi sejumlah lembaga klimatologi dunia, El Nino akan mencapai puncaknya pada akhir tahun ini, sejak November hingga Februari tahun 2024. Meskipun Indonesia akan berkurang dampaknya bila memasuki musim hujan.

Mengingat hal tersebut, Safuad mendesak pemerintah untuk menyiapkan program alternatif yang dapat mengatasi masalah kekeringan yang dapat berimplikasi pada sektor pertanian. Musabab, bila tak diantisipasi maka penurunan produksi padi di Kaltim akan terjadi.

Politisi PDI P mengatakan, koordinasi yang dan sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, serta pusat, sangat diperlukan untuk mengantisipasi dampak El Nino yang berpotensi mengganggu ketahanan pangan.

"Sudah ada program yang telah dibuat oleh Kementerian Pertanian, seperti antisipasi dini, adaptasi, mitigasi, dan kolaborasi. Ini patut diapresiasi. Namun, program tersebut belum cukup untuk mengatasi masalah yang dihadapi," jelasnya kepada media ini.

Semisal petani di Daerah Pemilihan (Dapil) -nya Kutim, yang mengalami penurunan produksi padi hingga lima puluh persen aki-

bat kekeringan. Dirinya menyarankan agar pemerintah menyediakan sarana prasarana yang dapat memastikan ketersediaan air untuk sawah-sawah di Kutim.

"Petani di Kutim sangat membutuhkan perangkat seperti pipa atau selang yang dapat menyalurkan air dari sumber-sumber air yang ada ke sawah mereka. Ini adalah peran pemerintah dalam membantu petani mengatasi keterbatasan mereka," ujar Legislator Dapil Bontang, Kutim, Berau ini.

Anggota DPRD yang telah dua periode duduk di kursi "Karang Paci" tersebut mengusulkan agar pemerintah membangun jaringan irigasi di beberapa wilayah yang menjadi sentral pertanian di Kutim, seperti Kaubun, Kaliorang, Long Mesangat, dan Kongbeng.

Ia mencontohkan, pemerintah dapat membuat sumur, bendungan, atau mata air, kemudian menghubungkannya dengan pipa ke sawah.

"Ini adalah solusi alternatif yang dapat membantu petani menghadapi El Nino. Saya yakin, dengan koordinasi yang baik dan anggaran yang maksimal, dampak El Nino dapat diminimalisir," tuturnya.

Lebih lanjut Safuad juga mengingatkan agar pemerintah memanfaatkan dana desa untuk membantu pembangunan jaringan irigasi tersebut. (Eky/Adv/DPRD Kaltim)

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari



TOBER

Deluxe Room

ONLY

Rp ~~698.000,-~~ 30% OFF

Rp 488rb

NETT/NIGHT

benefits

Breakfast 2 pax	FREE Laundry Up To 2 pcs	FREE Kopi Inspirasi Buy 3, Pay 2
FREE Afternoon Tea	FREE Mini Mantou 5 pcs	

➔ BOOK NOW

0811 581 3669
www.hotelgrandkartika.com



PEMKAB PPU SIAP GELAR "PENAJAM PASER
UTARA FESTIVAL 2023" NOVEMBER INI,
**BAKAL ADA ANDI RIF
DAN IROEL MAULANA**



**MAKMUR MARBUN PIMPIN
RAKOR PERSIAPAN AWAL JELANG
NATARU 2023 DI PPU**



Rapat persiapan dilaksanakan di ruang rapat Asisten II Setkab PPU, Kamis (9/11/2023). (Robbi/MediaKaltimGroup)

PEMKAB PPU SIAP GELAR “PENAJAM PASER UTARA FESTIVAL 2023” NOVEMBER INI, BAKAL ADA ANDI RIF DAN IROEL MAULANA

PPU - Dalam waktu dekat, Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) bakal menggelar “Penajam Paser Utara Festival 2023”. Dalam persiapan itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab PPU, Nicko Herlambang bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) PPU menggelar rapat persiapan, Kamis (09/11/2023).

Nicko mengatakan diselenggarakannya event akbar tersebut pada tanggal 17 hingga 20 November 2023 mendatang. Bertempat di 3 tempat sekaligus.

Yakni kawasan Stadion Panglima Sentik dan gedung Graha Pemuda Kelurahan Nipah-Nipah serta di Alun-Alun Taman Pemkab PPU. Pun rencananya, dalam gelaran ini akan menampilkan artis papan atas bergenre rock alternatif

“Pada tanggal 17 nanti itu pembukaan Expo dan pada tanggal 18 nanti pagi harinya akan ada car free day sekaligus jalan santai serta malam harinya akan ada penampilan Andi RIF dan Iroel Maulana,” terangnya.

Nicko mengharapkan nantinya pada event tersebut berjalan dengan lancar. “Makanya mulai dari sekarang harus dipersiapkan dengan matang,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pariwisata dan Pemasaran Disbudpar PPU, Juzlizar Rakhman sekaligus panitia pada event itu mengatakan melalui event ini, Pemkab PPU memberi ruang bagi para pelaku penggiat seni di PPU untuk menampilkan karya-karyanya. Bahkan bisa membuka seluas-luasnya bagi UMKM mendapatkan peluang pasar.

“Untuk dari segi event itu sendiri, ketika event ini berjalan dengan lancar tentu kondusivitas daerah bisa lebih baik,” ungkapnya.

Jul, sapaannya, juga mengharapkan dengan adanya event besar di PPU seperti ini tentu akan menumbuhkembangkan UMKM di Benuo Taka. Dengan menggelar event ini, PPU harapannya memiliki event unggulan sekaligus memberikan ruang tumbuhnya seni dan budaya, serta dukungan terhadap sektor perekonomian daerah.

“Tentu ini akan berdampak pada UMKM dan bisa lebih meningkat lagi dari segi pendapatan mereka. Dengan bertumbuhnya UMKM di PPU tentu perputaran keuangan daerah akan lebih meningkat untuk pendapatan daerah,” pungkasnya. (ADV/SBK)



Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat memimpin rapat koordinasi persiapan jelang Nataru 2023, Kamis (9/11/2023). (Robbi/MediaKaltimGroup)

MAKMUR MARBUN PIMPIN RAKOR PERSIAPAN AWAL JELANG NATARU 2023 DI PPU

PPU - Pj Bupati Penajam PPaer Utara PPU), Makmur Marbun saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) terkait persiapan jelang peringatan Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) di lingkungan PPU, Kamis, (9/11/2023). Pertemuan ini dilakukan lebih cepat dari biasanya, untuk mengantisipasi beberapa hal, dan memastikan persiapan optimal bisa dilakukan.

Walaupun perayaan pada akhir-akhir tahun itu masih cukup jauh, Makmur telah menginstruksikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera mempersiapkannya. Utamanya pada OPD yang berkaitan langsung dengan pengamanan ketertiban dan keamanan wilayah.

“Penajam Paser Utara harus menjadi kabupaten yang paling siap menyam-

but Natal 2023 dan Tahun baru 2024 ini,” katanya.

Ia menegaskan agar segala sesuatu terkait hari besar dan pergantian tahun khususnya di PPU, sudah disiapkan mulai sekarang. Karena menurutnya, jika terlambat dilakukan, dikhawatirkan ketika perayaan semakin dekan justru akan menyulitkan pihak-pihak yang dilibatkan nantinya.

Adapun rapat koordinasi ini merupakan langkah awal dalam persiapan. Ke depannya, pihaknya bakal melakukan beberapa kali rapat lagi untuk menindaklanjuti apa yang telah disepakati hari ini.

“Saya minta segera bentuk tim untuk Nataru ini dan siapkan segala sesuatunya. Saya belum tau dimana saja titik-titik posko Nataru untuk PPU,” pungkasnya. (ADV/SBK)



Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat memimpin pelaksanaan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pejabat Kepala Daerah, Kamis (9/11/2023). (Robbi/MediaKaltimGroup)

GELAR RAKOR PERSIAPAN LAPORAN KINERJA PJ BUPATI PPU, MAKMUR; MARI KERJA SEMAKSIMAL MUNGKIN UNTUK MASYARAKAT

PPU - Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) melaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pejabat Kepala Daerah, di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, Kamis, (9/11/2023). Giat ini dipimpin langsung oleh Pj Bupati PPU Makmur Marbun dan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) PPU Tohar, Para Asisten PPU. Serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab PPU.

Dalam arahnya, Makmur meminta kepada seluruh pimpinan OPD dapat bekerja semaksimal mungkin dalam meningkatkan pelayanan publik di PPU. Pun hal ini bukan untuk semata-mata pencitraan dirinya dalam memimpin PPU. Namun lebih ke pada pengoptimalan pelayanan pada seluruh masyarakat PPU.

"Capaian kinerja seluruh masing-masing OPD harus mengalami peningkatan, seiring dengan ditetapkannya kabupaten Penajam paser utara sebagai wilayah Ibu Kota Nusan-

tara (IKN)," ujarnya.

Lanjutnya, kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemkab PPU diminta untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran. Untuk bersama-sama bekerja dan berinovasi untuk kemajuan PPU

"Selaku Pejabat Bupati PPU mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala OPD dan para pejabat," sambung Makmur.

Adapun diskusi yang dilakukan terkait laporan persiapan kinerja Makmur yang diamanahi Kemendagri untuk memimpin Pemkab PPU hingga hasil Pilkada 2024 nanti ada. Di antaranya meliputi permasalahan stunting, keberadaan Badan Usaha milik Daerah (BUMD) dalam mengurangi angka pengangguran, persoalan perizinan hingga isu-isu terkait OPD.

"Semoga apa yang didiskusikan hari ini membawa dampak baik untuk kemajuan masyarakat kabupaten Penajam paser utara yang kita cintai," tutup Makmur. (ADV/SBK)



Pj Bupati PPU, Makmur Marbun saat menyerahkan Surat Keputusan (SK) Plh Kepala DPMD PPU pada Kepala Bagian Pemerintahan Setkab PPU, Muchtar, Kamis (9/11/2023). (Diskominfo PPU for MediaKaltimGroup)

TUNJUK PLH KEPALA DPMD PPU, MAKMUR BERI MANDAT PENGAWALAN PROSES LANJUTAN PILKADES SERENTAK 2023

PPU - Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun menunjuk Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Setkab PPU, Muchtar menjadi pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) PPU. Ia juga diminta untuk menjalankan tugas rutin sementara kedinasan, dan secara khusus untuk mengawal proses lanjutan proses Pilkades Serentak 2023.

Mandat itu diberikan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) di penghujung kegiatan rapat koordinasi (rakor) Persiapan Laporan Kinerja Pj Bupati PPU, Kamis (9/11/2023). Muchtar ditunjuk menggantikan sementara setelah terjadi kekosongan jabatan pasca Kepala DPMD PPU, Pang Irawan yang cuti.

Makmur mengatakan tugas-tugas yang ada di DPMD PPU saat ini sangat penting dan tidak bisa untuk ditinggalkan. Khususnya ialah pekerjaan untuk mengevaluasi proses Pilkades Serentak PPU.

"Pelaksana Harian diminta untuk melanjutkan dan mengawal proses terkait pemilihan kepala desa serentak di kabupaten Penajam Paser Utara," katanya.

Sebab, menurutnya Proses Pilkades ini telah menghadirkan dinamika menarik yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Untuk memastikan bahwa sistem demokrasi di tingkat desa

berjalan dengan baik, transparan, dan adil.

Seperti diketahui, Pemkab PPU telah melaksanakan pemilihan Pilkades Serentak di 14 desa pada 29 Oktober lalu. Ada beberapa hal yang menjadi evaluasi usai pelaksanaan pesta demokrasi di tingkatan pemerintahan terbawah untuk difokuskan.

Yakni mulai dari minimnya partisipasi pemilih dari 14 desa tersebut. Yaitu hanya mencapai 73 persen dari total pemilih yang terdaftar sebanyak 30.162 orang.

Kemudian juga terkait adanya fenomena terpilihnya kepala desa baru tanpa petahana dari 11 calon kepala desa (cakades) petahana yang bertarung dalam pilkades. Hal ini dinilai akan menjadi perhatian tersendiri bagi masyarakat dan pemangku kebijakan di daerah tersebut atas kinerjanya selama ini.

Lebih lanjut, beberapa hal itu lah yang diminta Makmur untuk dapat dikawal sebaik-baiknya. Adapun tugas Plh ini diberikan, sesuai aturan masa tugas paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang hingga 6 bulan.

"Saat ini proses Pilkades Serentak sudah masuk pada matrik jadwal penyerahan laporan akhir, dari BPD ke Bupati PPU melalui masing-masing camat. Seluruh kades terpilih akan dilantik pada 11 Januari 2024," pungkasnya. (ADV/SBK)



Ketua Komisi II DPRD PPU, Wakidi saat diwawancarai. (Robbi/MediaKaltimGroup)

KOMISI II DPRD PPU MINTA PEMKAB SUSUN STRATEGI ATASI WILAYAH RENTAN PANGAN

PPU - Ketua Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Wakidi meminta Pemkab PPU dapat segera memberikan perhatian terhadap sektor ketahanan pangan daerah. Mendorong adanya kebijakan proaktif untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga pangan.

Diketahui saat ini, sebanyak 20 desa/kelurahan di wilayah PPU masuk dalam klasifikasi rentan pangan. Ia mengungkapkan urgensi empat pilar ketahanan pangan sebagai pondasi untuk menghindarkan wilayah dari kerentanan pangan perlu difokuskan.

"Pemerintah harus bertindak cepat untuk memastikan persoalan pangan ini, tidak hanya tersedia dalam jumlah yang cukup, tetapi juga berkualitas," ujarnya Kamis (9/11/2023).

Sekadar informasi, empat pilar ketahanan pangan yang diidentifikasi mencakup ketersediaan pangan yang cukup, aksesibilitas, pemanfaatan berdasarkan gizi. Kemudian stabilitas dalam ketersediaan pangan.

Strategi ini diharapkan dapat membebaskan daerah dari ancaman kerentanan pangan yang saat ini tengah dihadapi. Selain itu, Wakidi juga menekankan pentingnya edukasi gizi bagi masyarakat.

"Soal itu, pemerintah harus berperan aktif dalam memberikan pengetahuan gizi dasar kepada masyarakat, sehingga mampu memanfaatkan pangan yang tersedia dengan tepat," jelasnya.

Namun demikian, masalah wilayah yang masih rentan pangan ini bukan hanya tanggung jawab dinas terkait, yakni Dinas Ketahanan Pangan (DKP) PPU. Namun lebih pada membutuhkan kerjasama dan sinergitas lintas instansi.

Kerjasama lintas sektor diharapkan dapat memberikan solusi komprehensif dan berkelanjutan terhadap permasalahan pangan di PPU. "Masyarakat juga harus mampu diberikan edukasi dan memastikan konsumsi pangan yang bernilai gizi," tutup Wakidi. (ADV/SBK)



Pj Bupati PPU, Makmur Marbun saat membuka kegiatan Pendampingan dan Penghargaan MCP 2023. (Robbi/MediaKaltimGroup)

PENDAMPINGAN DAN PENGHARGAAN MCP 2023, ASN PPU DIMINTA TINGKATKAN KUALITAS

PPU - Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun membuka acara Pendampingan dan Penghargaan Monitoring Center of Prevention (MCP) 2023 pada Area Intervensi Manajemen ASN Pemkab PPU. Kegiatan yang digelar ini dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI Kamis, (09/11/2023).

Makmur menjelaskan kegiatan ini memiliki signifikansi yang penting bagi roda pemerintahan Pemkab PPU. Mengingat peningkatan kualitas dan kinerja ASN Pemkab PPU sangat krusial saat ini.

"Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Inspektorat Jenderal Kemendagri Republik Indonesia. Yang dengan cepat memberikan respons positif terkait permohonan Kami untuk memberikan pendampingan dan pengarahan untuk ASN PPU," ujarnya.

Selain itu, ke depannya juga akan ada keterlibatan lembaga lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menilai capaian MCP. Hal ini juga merupakan sebuah langkah maju yang patut dilakukan.

Sebagai langkah dalam memastikan bahwa arah gerak dalam mewujudkan pemer-

intahan yang bersih dan bebas dari korupsi telah dilakukan. Untuk itu, kegiatan MCP dan penilaian yang dilakukan oleh KPK juga merupakan sebuah cerminan objektif. Terhadap kinerja dan integritas ASN di PPU.

"Saya juga menyadari bahwa ASN adalah tulang punggung dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks ini, Saya mengajak seluruh jajaran ASN untuk memandangi acara ini sebagai kesempatan untuk mengintrospeksi diri, memperkaya pengetahuan, dan mengasah keterampilan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," terang Makmur.

Lebh lanjut, ia juga mengajak kepada semua yang hadir untuk fokus membangun sinergi dan meningkatkan kompetensi. Serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas manajemen ASN di lingkungan Pemkab PPU.

"Mari Kita bersama-sama berkomitmen untuk mengubah tantangan menjadi peluang, meningkatkan capaian dalam manajemen ASN, dan menjadikan Pemkab PPU sebagai contoh yang baik dalam pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berintegritas." tutupnya. (ADV/SBK)



JARINGAN LISTRIK 24 JAM AKAN SEGERA HADIR DI DESA MELINTANG



**Sukses Tangani Inflasi, Pemkab
Kukar Kembali Terima Dana Insentif
Fiskal Sebesar Rp 11,6 Miliar**



Ilustrasi jaringan listrik di Desa Melintang (Istimewa)

JARINGAN LISTRIK 24 JAM AKAN SEGERA HADIR DI DESA MELINTANG

TENGGARONG- Kabar gembira bagi seluruh masyarakat Desa Melintang, Kecamatan Muara Wis. Pasalnya tidak lama lagi jaringan listrik PLN akan mengalir selama 24 jam sampai kesana.

Menanggapi hal ini Camat Muara Wis, Fadli Annur, turut menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaannya. Menurutnya, hal serupa juga pasti dirasakan oleh seluruh penduduk Desa Melintang.

Penantian warga untuk menikmati listrik 24 jam akhirnya terwujud dengan mulai tersambungny jaringan listrik dari Sistem Kelistrikan Kaltim ke Desa Melintang. Pemasangan jaringan listrik ini ditargetkan rampung sebelum akhir tahun 2023.

“Alhamdulillah warga kami sangat senang sekali dan bersyukur atas masuknya penerangan kampung dengan pemasangan jaringan PLN di wilayah yang terbilang sangat jauh dari perkotaan,” katanya.

Menurut Fadli, akses jalan di Desa Melintang saat ini sudah tersedia, sehingga memudahkan akses pemasangan jaringan listrik ke wilayah tersebut. Setidaknya, jaringan listrik 24 jam ini akan dinikmati oleh 512 Kepala Keluarga (KK) di Desa Melintang yang terdiri dari laki-laki 971 orang, wanita 833 orang.

Hal ini pun memudahkan mereka. Sebab, sebelumnya warga Desa Melintang hanya menikmati aliran listrik selama 6 jam, mulai pukul 6 sore hingga 12 malam. Aliran listrik itu pun berasal dari diesel yang dikelola oleh pemerintah desa. Setiap rumah pun dikenakan biaya iuran sebesar Rp 300 ribu per bulan agar bisa menikmati aliran listrik.

“Setelah penerangan di Desa Melintang, diharapkan dapat menyambungkan lagi ke Dusun Kuyung yang sampai saat ini juga belum teraliri listrik,” harapnya.

Sementara itu Manager PT PLN (Persero) UP3 Samarinda Pundhi Nugrohojati, mengapresiasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara. Apresiasi tersebut disampaikan atas sinergi dan support yang diberikan dalam mengiringi perjuangan PLN dalam melistriki masyarakat Kutai Kertanegara.

Pundhi juga mengucapkan selamat kepada masyarakat Desa Kedang Murung atas beroperasinya listrik 24 jam.

“Setelah penerangan di desa Melintang, diharapkan dapat menyambungkan lagi ke Dusun Kuyung yang sampai saat ini juga belum teraliri listrik,” harapnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



Wabup Kukar, Rendi Solihin. (Istimewa)

Pemkab Kukar Beri Dana Hibah Renovasi Masjid Senilai Rp 1 Miliar di Muara Badak

TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), terus lakukan berbagai perbaikan sarana rumah ibadah di Kukar. Kini giliran Masjid Nurul Iman di Desa Muara Badak Ilir, Kecamatan Muara Badak. Menerima dana hibah dari Pemkab Kukar untuk melakukan renovasi.

Tidak tanggung-tanggung, bantuan senilai Rp 1 miliar dialirkan Pemkab Kukar dan diserahkan secara langsung oleh Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin. Pemberian bantuan ini merupakan realisasi dari program Kukar Berkah, yang meliputi pembangunan sarana prasarana, kelengkapan alat ibadah, hingga rehabilitasi rumah ibadah.

"Semoga dengan bantuan dana tersebut dapat memperlancar proses pembangunan

Masjid Nurul Iman," kata Rendi.

Saat ini proses hibah anggaran untuk renovasi ini masih dalam tahan administrasi. Rendi mengatakan pencairan kemungkinan anggaran untuk renovasi tersebut bisa di raih pada akhir bulan ini.

Sementara itu, tanggapan positif pun disampaikan oleh Mansyur, salah seorang warga Desa Muara Badak Ilir. Sehingga proses pembangunan masjid di desanya bisa segera terealisasi.

"Alhamdulillah, ini sangat bermanfaat untuk pembangunan masjid kami. Terima kasih kepada Pak Bupati dan Pak Wakil atas perhatiannya kepada masyarakat kecil seperti kami," ujarnya. (adv)

Penulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



Bupati Kukar, Edi Damansyah. (Istimewa)

Sukses Tangani Inflasi, Pemkab Kukar Kembali Terima Dana Insentif Fiskal Sebesar Rp 11,6 Miliar

TENGGARONG- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan suntikan dana insentif fiskal bagi daerah yang mampu tekan angka inflasi di daerah. Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terima dana segar insentif fiskal kategori kinerja Periode III senilai Rp 11,6 miliar.

“Atas nama Pemkab Kukar sangat bersyukur atas penghargaan ini. Saya berterimakasih dan mengapresiasi kerja bersama seluruh TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah), OPD, dan masyarakat Kukar yang telah bersinergi menekan inflasi daerah,” kata Bupati Kukar, Edi Damansyah.

Edi menambahkan, pengendalian inflasi merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah. Besaran insentif fiskal yang telah diterima Pemkab Kukar dari Kemenkeu pun akan kembali digu-

nakan untuk kepentingan pengendalian inflasi di Kukar. Seperti memberi bantuan dalam bentuk operasi pasar untuk meredam lonjakan harga bahan pokok di pasaran.

Penerimaan dana fiskal ini merupakan yang kedua kalinya diterima oleh Pemkab Kukar. Berdasarkan catatan, pada periode kedua, Kukar menerima Rp 9,8 miliar. Untuk diketahui, Pemkab Kukar masuk kendala 24 kabupaten dari 514 kabupaten kota se-Indonesia yang menerima dana insentif fiskal ini.

“Insentif dana fiskal ini nantinya akan digunakan dalam rangka penanganan inflasi, stunting, program kemiskinan dan investasi di Kutai Kartanegara,” Pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



Kegiatan konsinyering BMD yang digelar Dinas PU Kukar. (Istimewa)

Gelaran Konsinyering Badan Milik Daerah Besutan Dinas PU Kukar Dapat Apresiasi Dari Sekkab

TENGGARONG - Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, apresiasi inisiatif Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar. Dalam menggelar konsinyering terkait pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), yang digelar selama tiga hari, di Hotel Aston Samarinda.

Kegiatan yang digelar sejak sejak tanggal 7-10 November 2023 ini. Dinilai Sunggono sebagai langkah baik yang diambil Dinas PU Kukar. Khususnya dalam hal pengelolaan pemerintahan daerah yang baik, salah satunya dengan melakukan pengelolaan BMD.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pertama yang melakukan konsinyering. Sunggono berharap kegiatan ini dapat memastikan pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar bisa berjalan dengan baik.

"Dinas PU Kukar menjadi OPD pertama yang secara khusus membicarakan dan ingin melakukan perbaikan pengelolaan aset yang dikelola mereka," terang Sunggono,

Rabu (8/11/2023).

Nantinya ini menjadi muara pelaporan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang berhubungan langsung dengan neraca keuangan dan neraca BMD. Juga penatausahaan BMD, inventaris BMD, standar harga satuan dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

Sunggono pun menyebut, tidak ada kendala dalam pelaksanaan ini secara sistem. Namun hanya pada perjalanan pengelolaan BMD, ada saja hal-hal berupa perencanaan, pencatatan, pengadaan dan hal lainnya yang tertinggal, tertunda dan terlupa administrasinya. Namun secara keseluruhan ia menilai pengelolaan yang dilakukan Dinas PU Kukar sudah baik sekali.

"Hasil dari konsinyering ini bisa dipastikan tindaklanjutnya bisa kita selesaikan bersama-sama. Tidak hanya Dinas PU saja, pasti ada hubungannya dengan OPD lain," pungkasnya. (adv)

Penulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



DIDUGA DEPRESI KARENA GANGGUAN JIWA, WARGA GUNTUNG DITEMUKAN GANTUNG DIRI

BACA HALAMAN A2



UPAYA TAWARKAN INVESTASI, DPMPSTP RUTIN IKUTI EXPO



Jenazah dibawa ke RSUD Taman Husada Bontang untuk visum. (Dwi)

Diduga Depresi karena Gangguan Jiwa, Warga Guntung Ditemukan Gantung Diri

BONTANG - Seorang pria berinisial CI ditemukan tewas gantung diri pada Kamis (9/11/2023) sekira pukul 07.00 Wita, di RT. 10, Gunung Dur, Desa Martadinata, Kutai Timur.

Yitno, kerabat korban yang ditemui saat di ruangan jenazah RSUD Taman Husada Bontang menjelaskan, CI merupakan salah satu warga Kelurahan Guntung yang tinggal di wilayah Gunung Dur. Kondisi CI sebelum ditemukan bunuh diri sedang mengalami gangguan jiwa.

"Saat kejadian memang lagi sendiri di rumah. Lagi kumat, istrinya pun diusir. Jadi memang kami ungsikan," ucapnya.

Korban sudah cukup lama mengalami gangguan mental namun kambuh-kambuhan. Saat penyakitnya kambuh, korban kerap beberapa kali didapati berupaya mencoba untuk melukai dirinya sendiri.

Bhabinkantibmas Kelurahan Guntung, Briptu Hardiansyah menyebutkan, korban pertama kali ditemukan oleh istrinya dalam keadaan sudah tergantung.

"Dugaan sementara korban bunuh diri akibat depresi," ucap Hardiansyah.

Hardiansyah pun menjelaskan, sebelumnya korban sudah beberapa kali dilakukan pendampingan ke

RSUD Kota Bontang, karena kerap menyakiti diri sendiri dengan benda tajam.

Pihaknya pun telah menyarankan, agar pihak dari keluarga memeriksakan lanjutan terkait kejiwaan korban di Samarinda.

"Karena Gunung Dur berbatasan dengan Kelurahan Guntung, jadi kejadian ini (peristiwa gantung diri) saya membantu backup penanganannya," jelasnya.

Saat ini, kondisi jenazah dibawa ke RSUD Taman Husada Bontang untuk dilakukan visum.

PENULIS: DWI S

EDITOR: YUSVA ALAM



Abdul Kadir Tappa (peci hitam) saat sosialisasi di Hotel Andika, Bontang. Berfoto bersama narasumber dan peserta sosialisasi. (Dwi).

Kadir Tappa: Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Perkuat Prinsip Negara

BONTANG - Sosialisasi penyelenggaraan wawasan kebangsaan ke-5 wilayah VI Kota Bontang, kembali digelar Anggota DPRD Provinsi Kaltim, Abdul Kadir Tappa. Sosialisasi kali ini bertempat di Hotel Andika, dan melibatkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bontang, serta dosen dari Universitas Trunajaya, Kamis (9/11/2023).

Abdul Kadir Tappa menjelaskan, terkait sosialisasi kebangsaan, wawasan kebangsaan memiliki arti penting dalam mempertebal rasa kebangsaan, serta meningkatkan semangat kebangsaan. Bagi bangsa Indonesia, wawasan kebangsaan merupakan nilai mendasar yang sudah menjadi pandangan hidup bangsa atau karakter politik bangsa.

“Menurut saya, setiap anggota DPRD mewajibkan setiap bulan, atau tiga bulan sekali mengadakan sosialisasi, sebagai tanda penguatan prinsip negara kita. Jika tidak dibarengi dengan prinsip, tidak akan bisa,” ucapnya saat menyampaikan sosialisasi.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, dikarenakan Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Keaneekaragaman tersebut terdapat di berbagai wilayah dari Sabang sampai Marauke.

Kepala Badan Kesbangpol Bontang, Sigit Alfian menyatakan, mengenai sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik dan Bhinneka Tunggal Ika dimaksud untuk memberi pemahaman tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila.

“Memberikan motivasi dalam menumbuhkan

kembali rasa cinta tanah air, dan rasa memiliki terhadap bangsa dan negara serta memotivasi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita,” paparnya.

Kegiatan ini juga diharapkan dapat membentuk tokoh-tokoh sebagai jaring pengaman sosial dalam memberikan pemahaman tentang Pancasila, UUD 1945, serta NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk menjaga Kota Bontang dari budaya asing, akibat dari pengaruh globalisasi yang semakin banyak mempengaruhi generasi muda.

“Maka dari itu, harapan saya pilar-pilar kebangsaan ini dapat ditumbuh kembangkan kembali bagi generasi muda, sehingga memunculkan rasa kebhinekaan yang semakin kuat, dan rasa cinta akan tanah air semakin besar,” ungkapnya.

Di kesempatan yang sama, Bilher Hutahaen, Advokat yang juga dosen di Fakultas Hukum Universitas Trunajaya Bontang mengungkapkan, empat pilar kebangsaan ini sebagai bagian terpenting dalam menyelamatkan NKRI, mengaitkannya dengan berbagai persoalan bangsa dan tantangan ke depannya.

“Empat pilar kebangsaan ini harus ditanamkan dalam pikiran dan perbuatan, agar setiap kita menjadi manusia yang berkontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” bebernya.

Bilher juga menambahkan sekarang banyak melihat bibit-bibit komunis muncul. Maka sangat perlu mengadakan sosialisasi empat pilar kebangsaan ini, karena jika tidak berhati-hati akan masuk ke generasi penerus kita, seperti anak. (dwi/adv).



Ilustrasi event expo Bontang. (Syakurah/Radarbontang)

Upaya Tawarkan Investasi, DPMPTSP Rutin Ikuti Expo

BONTANG - Sesuai dengan arahan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk kemajuan pembangunan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) rutin menawarkan investasi. Salahsatu caranya dengan ikut hadir dalam pameran-pameran di Kota Bontang.

Terdapat 17 peluang investasi di Kota Bontang. Di antaranya adalah pergudangan, pelabuhan, pabrik pengolahan limbah, pabrik pengolahan garam, pabrik penyulingan air laut, pabrik pengalengan ikan, pengolahan rumput laut, pabrik Isotank, pabrik pemrosesan biodiesel.

Kemudian gliserin, sabun dan detergen, pabrik pembuatan kaca, baking soda, jeruk,

pabrik pengolahan karet, pasar dan terakhir terminal.

"Ini jenis investasi tahun 2022, tahun ini mungkin ada update penambahan," jelas Analis Kebijakan Ahli Muda DPMPTSP, Lamri.

Dikatakannya, di pameran yang diikuti, pihaknya selalu menjelaskan kepada para investor terkait lahan yang tersedia, serta potensi-potensi yang bisa dilakukan. Hal ini dilakukan agar Bontang dapat berkembang pasca migas.

"Seperti yang kita ketahui bahwa kita nggak bisa terus berharap sama perusahaan, jadi kita harus menarik investor dengan cara apapun," harapnya. (sya/adv)



Asdar Ibrahim, Kepala Dinas DPMPSTP saat diwawancara. (Syakurah/Radarbontang)

Perusahaan Pengolahan Limbah B3 Lirik Investasi di Bontang

BONTANG - Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) bersama dengan calon investor PT. Sinergi Jelma Anugerah membawahi unit perusahaan koperasi serba usaha setia mahardika (SMAR's) melakukan kunjungan lapangan terkait investasi limbah Bahan Besar Beracun (B3).

Adapun alasan mereka tertarik di sektor tersebut karena di wilayah Kalimantan Timur sendiri belum memiliki pengolahan limbah B3 seperti oli bekas, aki, dan lain-lain. Kemudian, dari 18 item investasi yang di tawarkan terdapat pengolahan limbah B3.

"Perusahaan tersebut sebelumnya memiliki pengolahan limbah B3 di wilayah Jombang," jelas Kepala Dinas DPMPSTP, Asdar Ibrahim.

Mereka berkunjung Senin (6/11/23) kemarin

dan langsung melihat lokasi lahan industri yang terletak di Kelurahan Bontang Lestari.

"Kami belum tahu pasti, rencana mereka akan membangun koperasi saja atau PT juga," katanya.

Asdar menjelaskan, bahwa peluang tersebut hadir karena Kalimantan Timur akan menjadi Ibu Kota Negara (IKN) sehingga penanganan limbah B3 perlu hadir dan Kota Bontang menjadi target lokasi tersebut.

Untuk luas wilayah yang mereka minta untuk pembangunan gudang hingga produksi, kemungkinan akan membutuhkan sekira 100 hektar tanah.

"Mereka sempat bilang harga tanahnya agak mahal, tapi nanti akan ada negosiasi pasti. Semoga mereka berminat," tutupnya. (sya/adv)



Pelaksanaan Solution Week dan Refresh Training bagi tenaga kesehatan RSUD Bontang. (Yahya Yabo)

Update Penggunaan Alat Kesehatan, RSUD Bontang Gelar Solution Week dan Refresh Training

BONTANG - RSUD Taman Husada Bontang melaksanakan Solution Week dan Refresh Training Mindray bagi perawat, bidan, maupun dokter pengguna alat kesehatan produksi PT Mindray Medical Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu (8/11/2023) dan Kamis (9/11/2023) di ruang Nusa Indah, lantai 5 RSUD Bontang.

Wakil Direktur Pelayanan Kesehatan RSUD Taman Husada Bontang, dr Niken Titisuriangi, M.Kes mengatakan, kegiatan ini untuk memberikan penyegaran pengetahuan mengenai alat-alat kesehatan yang digunakan di RSUD Taman Husada Bontang, utamanya yang diproduksi atau disuplai oleh Mindray. Hal ini sesuai dengan visi RSUD Bontang menjadi RS terbaik di Kaltim berstandar internasional.

"Orientasi pada keselamatan pasien. Salah satu caranya harus merefresh SDM bagaimana keilmuan mengenai penggunaan alat-alat kesehatan. Ini juga merupakan komitmen mitra-mitra kami di bidang penyedia alat kesehatan sehingga mendukung kami," jelasnya, Rabu (8/11/2023).

la menambahkan, SDM RSUD Bontang

harus mengetahui penggunaan alat-alat kesehatan terbaru. Sehingga ketika ada permasalahan dapat segera ditangani.

"Bagaimana ketika ada trouble-trouble bisa langsung diatasi," katanya.

Modal utama selain skill bagi SDM yakni alat-alat kesehatan yang baik, yang digunakan untuk pasien. Dengan penggunaan alat kesehatan yang benar, akan dapat membantu masyarakat dan lebih efisien bagi penggunaan anggaran.

"Harapannya teman-teman dapat aware lagi. Ini menjadi modal bagi SDM membantu masyarakat yang dapat digunakan dengan baik," ungkapnya.

Sementara, perwakilan PT Mindray Medical Indonesia, Dwi Restyantoro mengatakan, pihaknya memberikan Solution Week dan Refresh Training Mindray sebagai komitmen kontribusi dalam peningkatan pelayanan kesehatan.

"Ini merupakan komitmen kami sesuai dengan kapasitas kami. Jadi kami memberikan produk-produk terbaru dan bagi pengguna-pengguna untuk memberikan update ilmu mengenai alat-alat kesehatan kepada dokter dan perawat," tandasnya. (adv/yah)



FRAKSI GOLKAR HARAP APBD 2024 BERMANFAAT UNTUK MASYARAKAT

AD



SOROTI ADANYA DISKRIMINASI PEKERJA DISABILITAS



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Sri Kumalasari saat menyerahkan notulen R-APBD Fraksi Golkar DPRD Berau.

FRAKSI GOLKAR HARAP APBD 2024 BERMANFAAT UNTUK MASYARAKAT

TANJUNG REDEB - Fraksi Golkar menyetujui Raperda APBD Berau 2024 dijadikan Perda. Namun, ada beberapa catatan yang diberikan kepada pemerintah daerah.

Juru Bicara Golkar, Sri Kumalasari dalam rapat paripurna pandangan akhir fraksi mengungkapkan, Aparatur Sipil Negera (ASN) harus lebih semangat dalam melayani masyarakat.

Selain itu, penyertaan modal kepada perusahaan daerah diharapkan berkinerja dengan baik dan profesional sehingga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Dengan pendapatan yang cukup signifikan semoga peningkatan pelayanan terhadap masyarakat kita semakin baik demi kesejahteraan," ungkapnya.

Ditegaskannya, dengan meningkatnya anggaran, pasti semakin banyak pula belanja untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar seperti penyediaan air bersih, jaringan komunikasi dan lain-lain.

"Seluruh OPD dalam pelaksanaan APBD

2024 harus optimal dalam penyerapan anggaran," katanya.

Ia menilai, pengawasan juga harus dilakukan, sehingga pelaksanaan APBD tahun 2024 sesuai dengan rencana dan arahan kebijakan pembangunan daerah.

"Berdasarkan masukan dan rekomendasi tersebut, Fraksi Golkar Berau menyetujui R-APBD tahun anggaran 2024 ditetapkan peraturan daerah Kabupaten Berau dengan porsi total pendapatan Rp 4,271 Triliun lebih," tuturnya dalam rapat paripurna.

"Yang Terdiri dari pendapatan asli daerah Rp 254 Miliar lebih, dana pendapatan transfer Rp 4,10 Miliar lebih. Total belanja Rp 719 miliar," sambungnya.

Sri Kumalasari berharap, besarnya APBD Berau Tahun 2024 mendatang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Berau.

"Tentunya kita menginginkan peningkatan pembangunan merata dan pertumbuhan ekonomi masyarakat kita juga berdampak baik," tandasnya. (adv/set)



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU**



Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiyah.

SOROTI ADANYA DISKRIMINASI PEKERJA DISABILITAS

TANJUNG REDEB - Adanya dugaan diskriminasi pekerja disabilitas menjadi sorotan Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiyah.

Diketahui, ada beberapa perusahaan mengklaim telah mengakomodir tenaga kerja disabilitas, tapi kenyataannya para penderita disabilitas tersebut masih dipandang sebelah mata.

Syarifatul mengimbau perusahaan di Kabupaten Berau untuk dapat menempatkan pencari kerja tersebut sesuai kapasitas dan kemampuannya masing-masing.

"Perusahaan juga harus bisa menempatkan mereka. Namanya disabilitas, tentu punya kekurangan," katanya.

Ia meminta setiap perusahaan di Kabupaten Berau bisa memanfaatkan kapabilitas para pekerja disabilitas tersebut, secara khusus untuk diberdayakan.

"Jangan juga diberikan hal yang kira-kira tidak bisa dilakukan. Pada dasarnya mereka (Pekerja disabilitas, Red) punya hak yang sama," tuturnya.

Kendati demikian, Politikus Golkar ini berharap peran aktif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk memberikan fasilitas sebagai jembatan antara pencari kerja dan perusahaan.

"Tidak lepas dari pengawasan pemerintah daerah. Tentunya agar tidak terjadi diskriminasi lagi nantinya," pungkasnya. (adv/set)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong.

BERAU AKAN BUAT KAJIAN AKADEMIS, SOAL TAWARAN GABUNG KALTARA

TANJUNG REDEB - Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong pada Senin (6/11/2023) lalu menghadiri diskusi laporan akhir rencana penggabungan Berau dengan Kaltara di Tanjung Selor.

Dirinya menilai, wacana itu cukup menarik untuk didiskusikan ke depan.

"Kami apresiasi inisiasi dari Kaltara. Dalam hal wacana penggabungan Kabupaten Berau masuk Kaltara," ucapnya.

Dia juga menegaskan, bahwa kehadirannya dalam kegiatan tersebut hanya melihat dan mendengarkan wacana penggabungan Kabupaten Berau ke Kaltara sesuai kajian akademis Pemprov Kaltara.

"Kami hanya anggota DPRD, representatif ada di tangan masyarakat," sebutnya.

Adapun kesimpulan yang didapatkan dari hasil diskusi tersebut akan disosialisasikan kepada masyarakat di Berau. Setelah itu melihat respons mereka. Kabupaten Berau pun bakal menyusun

kajian akademis terkait visi misi kepentingan Bumi Batiwakkal tersebut di Kaltara.

"Kemudian dari sisi kepentingan Kabupaten Berau sendiri. Itu kita juga akan melakukan kajian akademisi pula itu yang akan kita diskusikan di tingkat Kabupaten Berau bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, Pemkab Berau," bebernya.

Dia menilai hal itu bakal butuh proses waktu yang cukup lama. Pasalnya keputusan tersebut juga bersifat sakral. Apalagi ajakan bergabung ke Kaltara itu sudah wacana sejak lama. Pasti ada pandangan positif dan negatifnya. Pun keuntungan yang bisa didapatkan kedua daerah.

Sebab selama ini Kabupaten Berau yang masih menjadi bagian Provinsi Kalimantan Timur, ada beberapa faktor unggulan harus diperjuangkan.

"Seperti kita ini menjadi salah satu penyangga IKN yaitu pada sektor pariwisata," pungkasnya. (adv/set)



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU**



Anggota Komisi I DPRD Berau, Faletinus Keo Meo.

SEKTOR PENDIDIKAN HARUS DAPAT PERHATIAN LEBIH

TANJUNG REDEB - APBD Berau pada tahun 2024 mendatang menyentuh Rp 4,7 triliun. Maka dari itu, peningkatan sektor pendidikan diharapkan Anggota Komisi I DPRD Berau, Faletinus Keo Meo.

Dijelaskan Faletinus, anggaran 20 persen sudah terbagi dan Dinas Pendidikan hanya menerima 13 persen. Sedangkan untuk pembangunan hanya dianggarkan 0,8 persen. Jumlah ini membuat beberapa sekolah harus gigit jari, karena usulan mereka untuk menambah ruang kelas jadi terhambat.

"Saya rasa 30 persen atau 40 persen tidak masalah," imbuhnya.

Politikus Demokrat ini menambahkan, ada tiga masalah terbesar yang saat ini dihadapi dunia pendidikan Indonesia. "Yakni operasional sekolah,

keterbatasan guru, dan kesejahteraan guru. Padahal semua itu saling keterkaitan," katanya.

Menurutnya, permasalahan di sektor pendidikan hampir ada di seluruh daerah. Sebab, sektor ini sangat kompleks dan komprehensif.

"Mulai dari anggaran pendidikan, ketersediaan tenaga pendidik, peningkatan kualitas sumber daya pendidik, sarana prasarana, hingga infrastruktur pendidikan," paparnya.

Faletinus berharap pemerintah bisa mengatasi persoalan yang terjadi di dunia pendidikan tersebut.

"Dengan keterbatasan dari pemerintah, untuk memenuhi itu semua diperlukan koordinasi baik, dengan penyelenggara pendidikan itu sendiri," pungkasnya. (adv/set)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong.

APBD BESAR, DORONG PUSKESMAS DI PERKAMPUNGAN MAKSIMAL LAYANI MASYARAKAT

TANJUNG REDEB - Persoalan terkait kurang maksimalnya pelayanan Puskesmas yang berada di wilayah perkampungan disorot Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong.

Menurutnya, dengan APBD Berau tahun 2024 yang cukup besar, Puskesmas di pedalaman harus diberi perhatian lebih. Mengingat, jarak mereka cukup jauh dari pusat kesehatan yang ada di kota.

"Ini menjadi tugas berat bagi Dinas Kesehatan. Harus seimbang, antara bangunan Puskesmas dengan pelayanannya," ungkapnya.

Ketersediaan obat di fasilitas kesehatan, khususnya daerah perkebunan kerap didapati sudah

habis sebelum waktunya. Dinilai Rudi, penyebabnya yakni banyaknya perusahaan tidak memfasilitasi pekerjanya dengan klinik mandiri.

"Stok mereka pastinya akan cepat habis. Seharusnya perusahaan itu punya klinik mandiri," tegasnya.

Kendati demikian, dengan permasalahan yang ada mestinya pihak OPD bisa mengambil langkah antisipasi guna menstabilkan antara ketersediaan obat dan warganya.

"Perusahaan punya tanggung jawab. OPD juga mesti gesit dalam mengantisipasi keluhan masyarakat. Juga dalam memaksimalkan layanan Puskesmas," pungkasnya. **(adv/set)**



BELI PERTALITE BERULANG KALI DI SPBU, 2 PRIA DI SAMBOJA DITANGKAP POLISI



TOKO KUE DI GUNUNG GUNTUR TERBAKAR



Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Kaltim, AKBP I Nyoman Wijana didampingi Wadir Reskrimsus Polda Kaltim, AKBP Rakei Yunardhani menunjukkan barang bukti dan tersangka.

BELI PERTALITE BERULANG KALI DI SPBU, 2 PRIA DI SAMBOJA DITANGKAP POLISI

BALIKPAPAN - Polda Kaltim melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) menangkap dua orang pria berinisial R (47) dan J (37) warga Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur beserta sejumlah barang bukti kejahatannya.

Kedua pria tersebut diduga telah melakukan pengetaban BBM bersubsidi jenis Pertalite dari SPBU Kilometer 28 Samboja. Bahkan saat ditangkap, turut diamankan dua unit mobil dan di dalamnya terdapat 18 jeriken di masing-masing mobil.

Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Kaltim, AKBP I Nyoman Wijana didampingi Wadir Reskrimsus Polda Kaltim, AKBP Rakei Yunardhani mengatakan, dari hasil pengungkapan ini polisi berhasil menggagalkan penyalahgunaan BBM bersubsidi Pertalite sebanyak 780 liter.

"Selain dua orang tersangka yang kita amankan, kita juga amankan barang bukti berupa

satu unit mobil Avanza dengan 18 jerigen dan mesin pompa mini, juga satu unit mobil Sigr dengan 18 jeriken dan mesin pompa mini," ujarnya Kamis (9/11/2023).

Lebih lanjut Nyoman menjelaskan, dari masing-masing mobil juga diamankan BBM subsidi jenis Pertalite sebanyak 600 liter dari Sigr dan 180 liter dari Avanza, sehingga totalnya sebanyak 780 liter.

"Modus operandi dari kedua tersangka dengan mengantre untuk membeli BBM jenis Pertalite di SPBU kilometer 28 Kecamatan Samboja secara berulang kali," jelasnya.

Dari pemeriksaan yang dilakukan penyidik Ditreskrimsus Polda Kaltim, diketahui keduanya telah melancarkan aksinya selama satu tahun. Dan telah meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah.

"Dia beli dengan harga di SPBU, kemudian dijual ke pemilik Pom Mini dengan keuntungan Rp 2.000 per liter. Sudah

dilakukan oleh keduanya selama setahun ini," ujar Wadir Reskrimsus Polda Kaltim, AKBP Rakei Yunardhani.

Dalam aksinya, kedua pelaku membeli BBM secara normal, namun setelah keluar dari SPBU langsung memindahkan BBM dari tangki mobil ke jeriken yang ada di dalam mobil menggunakan mesin pompa mini.

"Kedua tersangka dijerat Pasal 40 angka 9 UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU atas perubahan ketentuan pasal 55 UU Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 60 miliar," tutup Rakei Yunardhani.

Penulis: Aprianto
Editor: Nicha Ratnasari



Kebakaran di toko kue Banana Gunung Guntur, Balikpapan Tengah, pada Kamis (9/11) sekitar pukul 14.10 Wita.

TOKO KUE DI GUNUNG GUNTUR TERBAKAR

BALIKPAPAN - Musibah kebakaran terjadi di Kota Balikpapan, tepatnya di RT 25 Kelurahan Sumbe Rejo, Balikpapan Tengah pada Kamis (9/11/2023) sekitar pukul 14.10 Wita. Api melahap sebuah bangunan berlantai 2 yang kesehariannya menjual makanan berupa kue.

Berdasarkan keterangan warga, Hasniah, api pertama kali terlihat dari bagian atas bangunan. Bahkan tak lama, kepulan asap hitam pun langsung membumbung tinggi.

"Saya pas di seberang tadi, lihat ada api di atap itu. Nggak lama asap, jadi saya teriakin saja yang di bawah," ujarnya.

Sementara itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Balikpapan yang mendapat informasi kebakaran tersebut langsung mengerahkan 10 unit mobil PMK ke lokasi kejadian.

"Alhamdulillah api berhasil kita padamkan lebih kurang selama 35 menit," ujar Plt Kepala BPBD Kota Balikpapan, Usman Ali.

Lebih lanjut Usman Ali mengaku, kendala yang dihadapi petugas di lapangan adalah banyaknya masyarakat yang menyaksikan ke-

jadian tersebut. Bahkan banyak kendaraan yang terparkir di bahu jalan.

"Karena lokasinya termasuk padat penduduk, dan masyarakat banyak yang menonton jadi kendala kami di lapangan. Tapi Alhamdulillah api tidak sempat menjalar ke bangunan lainnya," jelasnya.

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Namun, sempat terjadi aksi heroik dari pemilik bangunan yang sempat menyelamatkan anaknya dari lantai 2 tersebut.

"Bapaknya menyelamatkan anaknya dengan cara melemparkan ke petugas di bawah. Karena lantai 2 juga tidak terlalu tinggi maka anaknya pun berhasil kita selamatkan. Dan tidak ada korban jiwa," tutup Usman.

Hingga pukul 15.30 Wita arus lalu lintas yang sempat ditutup oleh petugas akhirnya dibuka kembali. Dan saat ini kondisi di lapangan telah kembali normal. Sedangkan untuk penyebab kebakaran sendiri, BPBD Balikpapan menyerahkannya kepada pihak kepolisian.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



BAWASLU KALTIM MINTA PARNPOL DAFTARKAN TIM KAMPANYE KE KPU

BALIKPAPAN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Timur bersama Kepolisian dalam hal ini Polda Kaltim, Polres hingga Polsek menggelar pertemuan dalam giat Meningkatkan Pelayanan dalam Rangka Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2024, di Hotel Platinum Balikpapan, Kamis (9/11/2023).

Ketua Bawaslu Kaltim, Hari Darmanto mengatakan, dalam pertemuan tersebut lebih memfokuskan pada penyamaan persepsi terkait pelayanan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kegiatan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

"Kami menyamakan persepsi antara pengawas dan pihak kepolisian. Dalam hal ini tentang STTP Kegiatan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024. Kami jelaskan kepada pelayanan kepolisian bahwa kegiatan kampanye harus jelas subjeknya," ujarnya.

Lebih lanjut Hari Darmanto menjelaskan, subjek kampanye yang dimaksudnya adalah pihak-pihak yang penyelenggara kampanye yang telah didaftarkan ke KPU setempat. Termasuk para calon legislatif yang bakal melaksanakan kampanye.

"Subjeknya tertentu. Pertama peserta pemilu, kemudian tim kampanye atau pelaksana kampanye. Jadi jika dia berhubungan dengan kampanye tapi tidak semua orang yang mengajukan permohonan kegiatan kampanye itu harus disetujui," jelasnya.

Di masa Pemilu lalu banyak ditemukan masyarakat, ormas, bahkan caleg yang melaksanakan pemilu namun tidak memiliki STTP Kegiatan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu. Sehingga pihak pengawas pemilu harus beradu argumen untuk menertibkannya.

"Apabila dia tidak terdaftar sebagai pelaksana kampanye itu tidak memenuhi keabsahan dan artinya bisa dilarang kampanye. Dan di masa lalu sering terjadi, kami berhadapan dengan caleg yang namanya tidak terdaftar sebagai pelaksana kampanye," tambah Hari.

Untuk itu pada pemilu tahun 2024 ini pihaknya juga telah meminta kepada seluruh parpol peserta pemilu untuk mendaftarkan tim pelaksana kampanyenya ke KPU guna bisa memperoleh STTP Kegiatan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu.

"Karena jika caleg ini pun tidak didaftarkan, meskipun dia telah ditetapkan sebagai calon anggota DPR sepanjang dia nggak disebut sebagai pelaksana kampanye dia tidak punya hak," tegas Hari Darmanto

Dalam pertemuan ini juga dibahas perihal peran kepolisian ditingkat polsek. Di mana untuk dapat bersama melakukan penertiban dan jembatan komunikasi bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan kampanye secara terbatas tatap muka ke masyarakat.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Japar Sidik

TIDAK ADA TITIK TERANG SOAL BANJIR DI GPA, DPRD SARANKAN PEMKOT PAKAI JALUR HUKUM

BALIKPAPAN - Dalam membina dan mengembangkan infrastruktur mutu di Indonesia yaitu standarisasi, penilaian kesesuaian, serta metrologi, Badan Standardisasi Nasional (BSN) senantiasa mendukung kebijakan strategis pemerintah Indonesia baik di pusat maupun di daerah melalui pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) serta memastikan penerapannya efektif di pasar.

Salah satu kebijakan pemerintah yang ditetapkan adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.

Dengan berlokasi di Kota Balikpapan, yang secara letak berdekatan dengan pembangunan IKN, BSN menyelenggarakan kegiatan Indonesia Quality Expo (IQE). Ini secara strategis membuktikan bahwa BSN sangat mendukung program pemerintah dalam membangun IKN.

Kepala BSN, Kukuh S Achmad mengatakan, IKN diharapkan akan menjadi role model dalam pengelolaan kota di Indonesia. Sehingga standarisasi memiliki tujuan untuk melindungi konsumen dan meningkatkan daya saing produk Indonesia, maka IQE sebagai kegiatan sosialisasi SNI serta pengenalan lembaga BSN, menjadi sangat penting di Wilayah Kalimantan Timur, yang akan menjadi lokasi pembangunan IKN.

"Di sinilah merupakan kesempatan yang sangat baik bagi BSN dan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Balikpapan, untuk mendorong pembangunan IKN dengan menggunakan produk dalam negeri dan tentunya ber-SNI," ujar Kukuh usai membuka IQE ke-11 Tahun 2023 di Gedung Dome Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) pada Kamis (9/11/2023).

Lebih lanjut Kukuh menjelaskan, bahwa menjadi cerminan dalam misi pelaksanaan

IQE tahun 2023, di mana IQE diharapkan dapat menjadi momentum bagi kebangkitan ekonomi, mengatasi isu-isu nasional dan global, serta terutama membangkitkan optimisme para pelaku UMK.

Selain itu, dalam momentum pembangunan IKN juga, BSN ingin menyuarakan pentingnya penggunaan produk dalam negeri dan tentunya ber-SNI.

"Oleh karenanya, kami berharap bahwa momentum IQE dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya yang terdekat masyarakat Kota Balikpapan untuk berkunjung ke pameran guna mendapatkan informasi standarisasi dan penilaian kesesuaian, mendapatkan pengalaman menggunakan produk ber-SNI dengan cara berbelanja atau mengikuti games dan kuis berhadiah produk SNI, serta semoga tercipta peluang terjadinya transaksi secara jangka panjang," jelasnya.

Terkait pembangunan infrastruktur, seperti bangunan rumah, gedung, jalan raya, bahkan bendungan, BSN telah menetapkan SNI atau dalam sektor konstruksi, sebanyak 1.140 SNI. Di antaranya, telah diberlakukan secara wajib SNI 2049:2015 Semen Portland dan SNI 2052:2017 Baja Tulangan Beton. Selain itu juga, BSN telah menetapkan SNI 3432:2020 Tata Cara Penetapan Banjir Desain dan Kapasitas Pelimpah untuk Bendungan.

"Untuk penataan kota atau wilayah, BSN juga telah menetapkan 4 SNI Smart City. Dikarenakan IKN berada di lingkungan alam dan tentunya ini juga akan menjadi role model sebagai kota yang bersih, asri, dan sehat, BSN juga menetapkan 244 SNI di sektor kehutanan," tutupnya.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



Panitra PN Balikpapan saat menemui Kuasa HuKum Jovinus Kusmadi saat menanyakan kelanjutan sita eksekusi aset PT DYS.

PN BALIKPAPAN KEDEPANKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN TERKAIT PERMOHONAN SITA EKSEKUSI KASUS WANPRESTASI PT DYS

BALIKPAPAN - Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan angkat suara perihal permohonan sita eksekusi yang diajukan oleh Jovinus Kusmadi selaku tergugat terhadap aset PT Dian Yuspa Samudera (DYS) yang hingga saat ini belum dapat dilakukan oleh PN Balikpapan. Meski sebelumnya, PN Balikpapan telah mengeluarkan penetapan sita eksekusi terhadap aset PT DYS tersebut.

Humas PN Balikpapan, Arif Wisaksono mengatakan, sita eksekusi belum dapat dilakukan karena PT DYS juga telah mengajukan gugatan lainnya terhadap Jovinus Kusmadi di PN Balikpapan dengan nomor perkara 92/Pdt.G/2023/PN.Bpp.

"Info dari panitera ditunda. Kewenangan sita eksekusi kan ada di Ketua PN, pelaksanaannya panitera dan juru sita lapangan. Pengadilan dalam kasus ini menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan putusan tersebut," ujarnya Kamis (9/11/2023).

Lebih lanjut Arif menjelaskan, prinsip kehati-hatian yang dimaksud adalah dengan adanya gugatan nomor 92/Pdt.G/2023/PN.Bpp yang bisa saja terkait dengan persoalan sebelumnya. Meski pihak pemohon sita eksekusi menilai gugatan tersebut tak saling berkaitan. Namun, PN Balikpapan tetap akan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

"Perkara nomor 92 ini, saat ini masih sidang. Nanti dilihat dalam putusannya, ada kaitan atau tidaknya," jelasnya.

Saat ini, gugatan nomor 92 masih berproses di PN Balikpapan. Proses sidang saat ini memasuki tahap pemeriksaan saksi-saksi dari

penggugat dalam hal ini PT DYS.

Seperti diketahui sebelumnya, Tim Penasihat Hukum Jovinus Kusmadi mendatangi PN Balikpapan untuk menanyakan kelanjutan surat permohonan eksekusi atas surat putusan bernomor perkara 146/Pdt.G/2017/PN Bpp yang dilayangkan PT DYS terhadap kliennya, Senin (23/10/2023) lalu.

Penasihat Hukum, Tumpak Situngkir mengatakan, kedatangannya ke PN Balikpapan untuk menanyakan kelangsungan dari surat permohonan eksekusi dari Jovinus Kusmadi selaku kliennya atas gugatan dari PT DYS. Di mana, sebelumnya Jovinus Kusmadi digugat oleh PT DYS terkait pemutusan hubungan kerja sama pembangunan dermaga yang berlokasi di kawasan Balikpapan Barat.

Dalam perkara tersebut, majelis hakim PN Balikpapan kemudian memutuskan bahwa PT DYS telah melakukan wanprestasi serta memerintahkan PT DYS untuk segera mengembalikan perizinan pembangunan dermaga kepada Jovinus Kusmadi. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap setelah melawati proses banding dan kasasi. Kemudian pada tanggal 23 Mei 2023, PN Balikpapan mengeluarkan surat penetapan teguran eksekusi.

Namun hingga batas waktu yang telah ditentukan, PT DYS belum juga melaksanakan putusan pengadilan. Pihak Jovinus Kusmadi kemudian mengajukan permohonan sita eksekusi.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari

KORAN **DIGITAL**

radar.
MEDIA
TERDEPAN

RADAR PASER

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM

EDISI JUMAT
10 NOV 2023



PEMBANGUNAN BANDARA PASER BELANJUT, DPRD INGATKAN JANGAN TERHENTI LAGI

**DPRD INGINKAN AGENDA
BUDAYA DI TAHUN MENDATANG
LEBIH MERIAH LAGI**





Kondisi pembangunan bandara

PEMBANGUNAN BANDARA PASER BELANJUT, DPRD INGATKAN JANGAN TERHENTI LAGI

PASER - Pembangunan bandar udara (bandara) di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tanah Grogot terus diupayakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser untuk dapat dilanjutkan pengerjannya.

Teranyar, pembangunan bandara dapat dilanjutkan. Nantinya dilaksanakan dengan skema pembiayaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Hal ini berdasarkan penyusunan dokumen studi pendahuluan kelanjutan pembangunan oleh PT Surveyor Indonesia.

"Ini merupakan solusi creative financing (pembiayaan kreatif) dalam melanjutkan pembangunan bandara Paser," kata Asisten Perencanaan dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Kabupaten (Setkab) Paser, Kamis (9/11/2023).

Skema itu diharapkan mampu memberikan ruang bagi pemerintah dalam hal pengalokasian risiko kepada pihak lain (swasta) yang lebih mampu dari segi pen-

gelolaan, biaya, dan pengalaman.

"Jika menggunakan skema sharing pembiayaan tiga mata anggaran, baik APBD kabupaten, provinsi dan pusat. Jika dengan APBD Kabupaten Paser tidak akan mampu," ucapnya.

Ia pun meminta Bappedalitbang untuk melengkapi dokumen kajian yang dibutuhkan sebagai persyaratan bagi terlaksananya pembangunan Bandara di Kabupaten Paser, seperti review masterplan pembangunan bandara, serta dokumen kajian lain yang diperlukan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Paser, Inayatullah menuturkan proses yang dilakukan sesuai arahan Kementerian Perhubungan (Kemhub) RI. Tahapan dilakukan mulai dari penyusunan dokumen kajian teknis.

Adapun penyusunan dokumen kajian teknis saat ini yaitu penyusunan studi pendahulu-

an dan review Detail Engineering Design (DED). "Proses sudah sampai penyusunan studi pendahuluan, review DED, dan sudah ditentukan sistem pendanaannya," ujarnya.

Saat ini proses pembangunan bandara telah sampai tahapan review master plan, dan menyesuaikan menyesuaikan kondisi lokasi dengan kebutuhan dan anggaran. "Target 2024 sudah selesai tahapan penyusunan review master plan," kata Inayatullah.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser, Edwin Santoso mengingatkan Pemkab Paser, agar pembangunan bandara kedepannya tidak terputus dan harus terus berjalan.

"Sehingga tahun berikutnya bandara Kabupaten Paser bisa mulai dibangun," kata Edwin. (Adv)

**Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari**



Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Paser, Edwin Santoso bersama Sultan Paser YM. Aji Muhammad Jarnawi

DPRD INGINKAN AGENDA BUDAYA DI TAHUN MENDATANG LEBIH MERIAH LAGI

PASER - Kabupaten Paser telah memiliki kalender pariwisata untuk memperkenalkan budaya daerah. Salah satunya Melas Taon yang digelar di Lapangan Gentung Temiang Tanah Grogot, yang sudah dilaksanakan sejak Senin (6/11/2023).

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser, Edwin Santoso, mengapresiasi kegiatan Melas Taon sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser terhadap kelestarian budaya daerah.

"Alhamdulillah kegiatan Melas taon 2023 ini berjalan lancar dan sangat meriah. Semoga kegiatan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat," ucap Edwin Santoso.

Untuk kelancaran kegiatan Melas Taon, kata Edwin, Pemkab Paser telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,7 miliar melalui APBD Kabupaten Paser Tahun 2023.

"Tahun ini tidak sedikit anggaran yang disiapkan Pemkab Paser untuk penyelenggaraan Melas Ton, informasi yang saya dapat anggaran yang digunakan untuk kegiatan ini bersumber dari APBD Paser tahun 2023," jelasnya.

Menurut Edwin, kegiatan yang melibatkan tokoh adat dan Lembaga Adat Paser sangat bagus sebab nilai sakral dan budaya yang ditampilkan benar-benar menyentuh

pada kebudayaan asli Paser.

"Saya berharap di tahun-tahun yang akan datang, kalau bisa untuk prosesi acara Melas Taon yang bersifat sakral bisa lebih banyak, kemudian peran dari pihak Lembaga Adat Paser perlu ditingkatkan sebab persiapan acara ini tidak boleh sembarangan dan butuh persiapan yang matang," jelasnya.

Menurutnya, agenda Melas Taon merupakan agenda masyarakat Paser. Sehingga peranan dan kehadiran masyarakat sangat penting untuk meramaikan kegiatan Melas Taon ini.

"Ini kegiatan masyarakat, jadi kami harap masyarakat yang seharusnya turut serta dan berpartisipasi dalam kegiatan ini, semoga saja kedepan bisa semakin meriah lagi," harapnya.

Berkaitan dengan waktu dan tempat pelaksanaan, ia berharap tahun depan dapat dilaksanakan di Taman Promosi Putri Petung atau Eks MTQ. Sebab ia menilai lokasi tersebut menjadi pusat berkumpulnya masyarakat.

"Kalau bisa di gedung Eks MTQ itu, waktunya sore lah, jadi masyarakat juga bisa hadir dan menyaksikan pembukaan acara Melas Taon," pungkasnya. (Adv)

Pewarta : Bhakti Sihombing

Editor : Nicha Ratnasari